

## Alokasi Anggaran Pendidikan 22 Persen



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id      Rabu,17/07/2024

Pemkab Kutai Barat mengajukan APBD 2025 sebesar Rp2,99 triliun. Juga telah menetapkan target dan arah kebijakan prioritas pemenuhan belanja wajib dan mengikat untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

**PENAJAM** – Pemkab Kubar melalui Wakil Bupati H Edyanto Arkan menyampaikan secara garis besar program-program prioritas pembangunan Pemda 2025. “Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, terwujudnya transformasi SDM lokal yang kompeten, adaptif, dan inovatif,” ungkapnya, Selasa (16/7).

Fokus pembangunan Pemkab 2025 adalah peningkatan kualitas konektivitas wilayah. Untuk menunjang proses transfer pengetahuan dan adopsi inovasi dan menghubungkan antar sumberdaya lokal.

Ia menambahkan, prioritas peningkatan daya saing dan perluasan daerah ekspor sektor-sektor unggulan dan potensial. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan melalui kemudahan masyarakat dalam mengakses dan mengolah sumber daya lokal di wilayahnya.

“Sejalan dengan program prioritas pembangunan daerah, maka dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia dan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Pihaknya juga akan memperhatikan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan mendatang. “Prioritas pembangunan pada tahun 2025 berdasarkan hasil konsultasi publik dalam Musrenbang RKPD,” ucapnya.

Selain itu prioritas pemenuhan belanja *mandatory*, yaitu prioritas belanja yang besarnya sudah diatur undang-undang, bertujuan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Yaitu belanja sektor pendidikan yang dialokasikan sebesar 22 persen dari total belanja daerah.

Kemudian sektor kesehatan dialokasikan sebesar 19 persen dari total belanja. infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 19 persen dan Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut Wabup prioritas pemenuhan belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu prioritas belanja untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

“Prioritas pemenuhan belanja program dedikasi, yaitu belanja prioritas pembangunan daerah yang merupakan program unggulan kepala daerah,” tandasnya. Menurutnya, prioritas pemenuhan belanja prioritas lainnya merupakan dukungan belanja terhadap prioritas provinsi, serta belanja arahan hasil audit. (\***/ard/kri**)

#### **Sumber berita:**

1. KaltimPost, Alokasi Anggaran Pendidikan 22 Persen, 17/07/24

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.